



Konflik Nelayan dan Penambangan Timah dalam Perspektif Ralf Dahrendorf (Studi Kasus di Desa Penagan)

Abdul Rohim¹, Fitri Ramdhani Harahap², Iskandar Zulkarnain³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Email : abdulrohim110301@gmail.com¹

Article Info

Article history:

Received July 04, 2025

Revised July 12, 2025

Accepted July 20, 2025

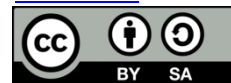
Keywords:

Social Impact, Dialectical Conflict, Fishermen, Tin Miners

ABSTRACT

Uncontrolled marine tin mining activities cause environmental degradation that triggers conflicts between fishermen and tin miners. This research aims to analyze conflicts in marine resource management between traditional fishermen and tin miners and analyze the socio-economic impact that arise due to unconventional tin minning activities. This research uses Ralf danrendorf's dialectical conflict theory, data collected through in-depth interviews. The method used is qualitative research with a case study approach. The result of the study found two important things: first, the conflict between fishermen and tin miners occurred due to the existence of marine tin mining activities which triggered protests and rejection from fishermen and past conflicts with migrants, especially from the Selapan area. Secound, the conflict had environmental, social and economic impacts. The environmental impact could be seen from the destruction of coral reefs and the decline in seawater quality. Social impacts such as work safety risks due to increasingly distant access to fish and unfavorable relationships between middlemen and fishermen and diviisions that occurred in fishing groups economic impacts in the from of reduced catches, increased production costs and decreased income. Tin minning activites in Penagan illage not only bring negative sides to the suistanability of nature resources, but can also limit traditional fishermen in their activites. This condition threatens the sustainability of natural resources and limits the living space of fishermen.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 04, 2025

Revised July 12, 2025

Accepted July 20, 2025

Kata Kunci:

Dampak Sosial, Konflik Dialektik, Nelayan, Penambang Timah

ABSTRAK

Aktivitas penambangan timah laut yang tidak terkendali menyebabkan adanya degradasi lingkungan sehingga memicu terjadinya konflik antara nelayan dan penambang timah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik dalam pengelolaan sumber daya laut antara nelayan tradisional dan penambang timah serta menganalisis dampak-dampak sosial ekonomi yang muncul akibat aktivitas penambangan timah inkonvensional. Penelitian ini menggunakan teori konflik dialektik Ralf Danrendorf, Data di kumpulkan dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal penting pertama, Konflik antara nelayan dan penambang timah terjadi karena keberadaan aktivitas tambang timah laut yang memicu aksi protes serta penolakan dari nelayan dan konflik masa lalu dengan pendatang terutama dari daerah selapan. Kedua, konflik berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Dampak lingkungan, terlihat dari rusaknya terumbu karang dan menurunnya kualitas air laut. Dampak sosial seperti resiko keselamatan kerja karena akses ikan semakin jauh serta hubungan yang kurang baik antara tengkulak dengan nelayan dan perpecahan yang terjadi pada kelompok nelayan. Dampak ekonomi berupa hasil tangkapan nelayan berkurang, biaya produksi yang di keluarkan juga meningkat dan pendapatan semakin menurun. Aktifitas penambangan timah laut di Desa Penagan tidak hanya memunculkan sisi negatif bagi kelangsungan sumber daya alam, namun juga dapat membatasi nelayan tradisional dalam beraktifitas. Kondisi ini mengancam keberlangsungan sumber daya alam dan membatasi ruang hidup nelayan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Abdul Rohim

Universitas Bangka Belitung

E-mail: abdulrohim110301@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam yang terkenal di Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pertambangan timah atau masyarakat lokal biasa dikenal dengan istilah Tambang Inkonvensional (TI). Pada mulanya pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung dilakukan di daratan, namun sering dengan pergeseran waktu serta sudah menipisnya timah di daratan penambang timah mulai bergeser ke arah laut untuk mencari timah. Terjadinya pergeseran penambang timah dari daratan ke lautan menimbulkan konflik seperti adanya sikap penolakan oleh masyarakat terhadap penambangan timah di lautan, penolakan terutama dilakukan oleh nelayan tradisional yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari lautan. Aktivitas Tambang Inkonvensional (TI) juga diketahui tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Hal ini karena dalam aktivitas penambangan timah tersebut dilakukan dengan tidak berwawasan lingkungan (Sujadmi & Murtasidin, 2020), sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Salah satu desa di Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan aktivitas TI di kawasan laut yaitu Desa Penagan yang terletak di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Aktivitas penambangan timah di lautan tersebut sangat berdampak terhadap aktivitas lain yang ada di desa Penagan, yaitu nelayan tradisional. Aktivitas TI di laut nyatanya tidak hanya membawa keuntungan materil, akan tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat nelayan Desa Penagan. Berdasarkan data di dalam Profil Desa Penagan tentang mata pencaharian pokok, diketahui bahwa warga nelayan di Desa Penagan berjumlah 80 orang (Profil Desa Penagan, 2022). Selain itu, berdasarkan pada data observasi peneliti bersama hasil wawancara peneliti dengan para informan, sebanyak 10 orang mengatakan bahwa pendapatan nelayan tradisional akibat adanya aktivitas tambang laut di Desa Penagan mengalami penurunan yang cukup signifikan (Penagan, 2023).

Aktivitas penambangan timah yang tidak terkendali dan terus menerus dilakukan di laut berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang dan dapat menimbulkan ketidakpastian masa depan masyarakat, khususnya nelayan tradisional (Yunianto, 2009). Ketidakpastian terhadap masa depan ini menjadi ancaman bagi masyarakat nelayan di Desa Penagan dalam mencari ikan di laut, dan merupakan salah satu bentuk penindasan hak atas pekerjaan nelayan tradisional di Desa Penagan. Selain itu, keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengelola sumber daya laut menimbulkan konflik kepentingan antara penambang dengan nelayan (Sulaiman et al., 2015). Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan, peneliti melihat bentuk-bentuk penolakan nelayan tradisional dari adanya aktivitas penambangan ditandai dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat nelayan tradisional di depan kantor pemerintahan Desa Penagan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas penambangan timah di laut Desa Penagan. Disadari atau tidak, wilayah pesisir semakin penting bagi kehidupan



manusia. Berbagai Aktivitas dan pemanfaatan lahan di daerah pesisir sering kali saling bersinggungan (Jean, 2021). Dampak dari keadaan ini mencakup permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan perebutan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kasus ini terjadi antara penambang dengan nelayan tradisional, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik yang tidak bisa dihindari antara penambang timah dengan nelayan tradisional.

Konflik antara nelayan dan penambang terjadi dalam persoalan perebutan kepentingan mengelola sumber daya alam. Semua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Nelayan mengakses laut sebagai lahan mencari ikan, sementara penambang mencari bijih timah, namun dengan tanpa memperhatikan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini tentu sangat berdampak secara langsung bagi aktifitas nelayan dalam mencari ikan sehingga menjadi sumber utama konflik kepentingan antara penambang dengan nelayan. Hingga saat ini, konflik tersebut masih berlanjut. Ini merupakan cerminan dari serangkaian kepentingan yang dimainkan oleh aktor-aktor di sektor pertambangan dalam perebutan sumber daya laut.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dalam Pasal 1 Ayat 5, menyebutkan bahwa, “nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.”

Beberapa peraturan hukum terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Republik Indonesia, 2014), memiliki sejumlah ketentuan yang dapat menimbulkan pengecualian. Ada kekhawatiran terkait hak, karena istilah-istilah tertentu dapat memberikan ruang untuk pembatasan atau bahkan penghapusan hak-hak masyarakat adat, yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berusaha menganalisis konflik kepentingan antara masyarakat nelayan dan masyarakat penambang timah di wilayah laut Desa Penagan yang kemudian menjabarkan dampak terhadap hak atas pekerjaan, hak mencari nafkah dan hak dalam mengelola sumber daya pesisir laut. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah *“Konflik Pertambangan Timah Inkonvensional dan Perikanan Tangkap Tradisional dalam Perspektif Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf.”*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian studi kasus memiliki tujuan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Selain itu, dengan penelitian kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kondisi yang nyata atau data yang sebenarnya (Sudaryono, 2017). Sesuai dengan judul penelitian, peneliti akan mendeskripsikan mengenai konflik penambangan timah terhadap nelayan tradisional di Desa Penagan. Pendekatan ini digunakan karena dianggap cukup relevan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kasus konflik nelayan dan penambangan timah yang mengacu pada realitas



kelompok sosial yang menafsirkan tindakan dan pengalaman satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa tersebut karena peneliti ingin melihat dan menguraikan konflik antara nelayan tradisional dengan penambangan timah laut di wilayah Desa Penagan, serta ingin mengetahui dampak dari adanya tambang tersebut terhadap hak nelayan tradisional dalam mencari ikan di laut. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang kontra dengan adanya penambangan timah tersebut melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi penolakan di kantor kepada Desa Penagan.

Target/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah masyarakat yang terlibat dalam penambangan di wilayah laut Desa Penagan. Teknik identifikasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi informan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan (sugiyono, 2010). Dengan kata-kata yang lebih sederhana, sampel yang tersedia diubah sesuai dengan kriteria tertentu sejalan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang topik tertentu, dengan pemilihan berdasarkan pada berbagai faktor dan kriteria yang telah ditetapkan. Informan-informan ini berperan dalam menyediakan rincian tentang keadaan dan lingkungan penelitian.

Kriteria pemilihan informan mempertimbangkan elemen-elemen yang terkait dengan teori yang diselidiki. Dalam hal ini, peneliti sudah memiliki kriteria informan yang akan diwawancara yang mana karakteristiknya sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, di antaranya:

1. Nelayan/penambang yang berdomisili di Desa Penagan yang pernah terlibat langsung dalam konflik kepentingan dengan penambang.
2. Informan mengetahui kondisi laut sebelum dan sesudah adanya operasi penambangan timah laut.
3. Pernah terlibat langsung dalam penanganan konflik seperti Kepala Desa (Kades) atau Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam penanganan konflik.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Informan dari data primer ialah individu, kelompok fokus, dan satu kelompok (Silalahi, 2017). Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer melibatkan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan nelayan, penambang, dan pihak pemerintahan Desa untuk mendapatkan informasi yang langsung berasal dari informan sebanyak 15 informan yang diantaranya yaitu nelayan sebanyak 10 orang, penambang timah laut sebanyak 3 orang dan pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.

2. Data Sekunder



Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2017: 291). Selain itu, data sekunder juga menjadi data pendukung dan pelengkap yang digunakan peneliti. Dokumen dari data sekunder ini berupa buku profil Desa Penagan Tahun 2022 dan hasil dari penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi, foto serta artikel dari situs internet yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tujuan peneliti menggunakan metode wawancara ialah supaya bisa mendapatkan data yang lebih jelas dan detail. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai nelayan yang ada di desa penagan, penambang timah, tokoh masyarakat dan pemerintah desa sebagai sumber informasi untuk memenuhi data peneliti. Durasi wawancara dalam penelitian ini dibatasi maksimal satu jam, bertujuan untuk menjaga konsentrasi agar informasi yang diperoleh tetap fokus sesuai dengan topik penelitian.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan menggunakan metode observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan adalah suatu proses pengamatan oleh peneliti tanpa ikut serta dalam kehidupan subjek yang diamati, dan berfungsi sebagai pengamat terpisah, sesuai dengan definisi Margono (2005). Selama observasi, peneliti segera mencatat perilaku yang muncul untuk memvalidasi fenomena yang sedang diteliti. Fenomena tersebut mencakup gerak tubuh, perilaku, ekspresi wajah, serta respon saat menjawab pertanyaan. Proses observasi dilakukan saat aktivitas penambangan, aktivitas para nelayan hendak melaut, dan mediasi di kantor desa antara nelayan dan penambang timah laut. Dalam proses observasi peneliti meninjau secara langsung ke lokasi penambangan menggunakan perahu nelayan yang ada di sekitaran penambangan.

3. Dokumentasi

Pendokumentasian penelitian ini merupakan salah satu upaya peneliti untuk mendapatkan data visual dari foto-foto yang diambil pada saat observasi dan wawancara, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian (Afrizal, 2016). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dimana peneliti dan narasumber di foto menggunakan smartphone.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data, artinya peneliti mengolah setiap informasi dari lapangan berupa wawancara, observasi atau dokumen kemudian mengelompokkannya menjadi pertanyaan-pertanyaan pokok yang sesuai dengan penelitian tentang dampak dari adanya pertambangan timah laut terhadap hak nelayan tradisional, sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Proses yang peneliti lakukan saat penyajian data adalah memastikan bahwa presentasi data tetap terfokus pada inti permasalahan. Penyajian data kemudian diimplementasikan melalui matriks, grafik, atau diagram sebagai panduan visual informasi terkait dengan



pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah dilakukan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses menarik kesimpulan adalah bagian penting dari penelitian. Informasi yang diorganisasikan dengan cara ini kemudian dihubungkan dengan pola hubungan sebab akibat dan persamaan dengan pendapat lain. Metode ini digunakan untuk membantu peneliti menganalisis pengamatan hasil penelitiannya, mendeskripsikan poin-poin penting dan mencari solusi dari penelitian tersebut. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil reduksi informasi terkait penelitian tentang dampak dari aktifitas penambangan di pesisir laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Dialektis Nelayan Tradisional

Dalam analisis teori Dahrendorf, kekuasaan dan perbedaan kepentingan merupakan aktor utama terjadinya konflik di dalam masyarakat. Aktor dalam konflik dapat berupa kelompok kepentingan, kelompok sosial ataupun individu yang terlibat dalam hubungan sosial yang di pengaruhi oleh kekuasaan dan konflik. Dalam pembentukan kelas terhadap pengelolaan laut desa penagan, atas dasar kepentingan ini kemudian membentuk kelompok-kelompok kelas antara nelayan tradisional dan penambang timah laut. Pembentukan kelompok ini yang kemudian merujuk kepada kepentingan bersama.

Dahrendorf mengklasifikasikan tiga tipe utama kelompok yaitu, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu adalah calon tipe kedua sebelum terbentuknya kelompok kepentingan, dan dari berbagai kelompok kepentingan muncullah kelompok konflik, kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. kelompok kepentingan dalam arti sosiologi memiliki struktur yang ketat. Dan kelompok ini adalah agen rill dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai tujuan, bentuk organisasi, atau program dan anggota perorangan.

Fenomena kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan dalam distribusi otoritas "selalu menjadi faktor pemicu konflik sosial sistematis". Dahrendorf mengasumsikan bahwa konflik merupakan proses yang tak terhindarkan, timbul dari adanya kekuatan bertentangan dalam pengaturan sosial dan struktural, keterlibatan oknum korem sebagai pihak keamanan dan elit lokal sebagai dukungan tentunya memperoleh kekuasaan dalam mendominasi jalanya sektor timah di lingkungan sekitarnya, Sebagaimana resolusi konflik melalui meditasi yang dilakukan kedua kelompok masyarakat ini dengan memberikan kompensasi bahwa hal tersebut hanya akan menciptakan konflik yang berlanjut di antara kekuatan yang menentang. Hal ini sejalan dengan Penyelesaian konflik pada suatu titik waktu bisa menciptakan situasi struktural yang, dalam kondisi tertentu, tidak dapat dihindari, yang kemudian dapat mengarah pada konflik lebih lanjut antara kekuatan yang bertentangan (Nendissa, 2022). Dahrendorf mengatakan bahwa otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur utama dalam suatu analisis. Otoritas secara jelas menyatakan adanya superordinasi (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai). Karena Masyarakat berada pada berbagai kelompok, seorang individu dapat menempati kelompok di suatu unit dan menempati posisi yang



subordinat di unit yang lain. Mereka yang memiliki otoritas diharapkan akan dapat mengendalikan bawahan dalam hal ini pihak korem sebagai pemangku otoritas.

Keterlibatan oknum korem dalam aktivitas penambangan timah di desa penagan bermula adanya ponton timah yang datang ke lokasi penambangan yang di bekangi oknum korem, hal ini tentunya mendapat respon dari penambang lokal untuk menolak, dikarenakan peralatan yang di bawa ponton tersebut lebih besar dan lebih canggih di bandingkan dengan penambang lokal punya pada saat itu, sehingga terjadi kesepakatan baru yang terjadi antara pihak korem dan penambang, dimana 10% sepuluh persen pendapatan di sumbangkan ke masjid sebagai bentuk fii kepada masyarakat. Tidak berhenti di situ, nelayan yang mendengar hal tersebut juga ingin kompensasi yang sama bagi kelompok mereka, dikarenakan berdampak secara langsung bagi sumber penghidupan para nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan melaut. Akibat dari kompensasi tersebut kelompok nelayan yang sebelumnya menolak aktivitas penambangan timah terpecah menjadi dua kelompok, yaitu nelayan yang pro tambang dengan menerima fii dari para penambang dan nelayan yang kontra, yang masih bertahan dengan pendiriannya menolak penambangan yang di anggap merugikan nelayan dalam mencari ikan. Dalam hal ini terus terjadi pertentangan-pertentangan antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimana memicu konflik yang terus berkesinambungan.

Kehadiran tambang timah pada awalnya bermula dari adanya masyarakat penambang yang menemukan lokasi biji timah yang berada tepat di pesisir selatan laut Desa Penagan sehingga kegiatan menambang timah dimulai. Pada awalnya, hanya ada beberapa penambang yang melakukan aktivitas menambang timah di lokasi pesisir laut. Namun, seiring berjalanya waktu, para penambang lain juga ikut melakukan penambangan dengan alasan hasil yang didapatkan sangat fantastis dan menguntungkan. Kegiatan penambangan tersebut bermula pada awal tahun 2023 dan terus berlanjut hingga saat ini. Aktivitas penambangan yang terus bertambah jumlahnya tentu mendapat respon dari masyarakat pengelola laut. Dalam hal ini, nelayan tradisional yang ada di lingkungan Desa Penagan. Berikut wawancara peneliti dengan Pak Rohman (46 tahun, nelayan) yang mengatakan sebagai berikut:

“Kegiatan para penambang tersebut sangat mengganggu, sehingga kami sebagai nelayan merasa sangat dirugikan secara langsung, di mana jalur kami pergi melaut mulai terbatas dan karang yang menjadi tujuan kami pun hancur.”

(Wawancara dengan Bapak Rohman selaku nelayan, 25 September 2022)

Kegiatan tambang timah di laut Penagan mendapatkan aksi protes dari nelayan tradisional, dikarenakan menghambat aktivitas para nelayan dalam mencari ikan seperti akses keluar masuk sungai yang terhambat akibat adanya ponton-ponton yang berbaris sepanjang pesisir pantai. Hal ini juga membuat nelayan kesulitan saat membentangkan jaring di tempat mereka biasanya beraktivitas mencari ikan. Sungai yang menjadi dangkal akibat sedimen bekas tambang juga perlahan menutupi alur yang menjadi akses keluar-masuk nelayan dalam melakukan aktifitas melaut. Ini dikarenakan laut yang bersifat *open acces* sehingga munculnya kepentingan di dalam masyarakat. Konsekuensi dari sifat laut yang *open acces* tersebut kemudian memberikan peluang masuknya penambang timah ke wilayah laut. Tidak adanya pihak yang melarang membuat para penambang terus bertambah jumlahnya sehingga adanya perdebatan antar kompetitor dalam memperebutkan akses. Akses inilah yang menjadi hambatan

bagi para nelayan. Kemudian, muncul aktor-aktor yang terlibat dalam dinamika konflik yang terjadi antara penambang dan nelayan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam melancarkan aktivitas penambangan timah tentunya memiliki peranan yang sangat penting untuk mem-*backing* para penambang. Selain itu, keterlibatan oknum Korem sebagai pihak keamanan bagi penambang dalam beraktivitas, elit lokal seperti tokoh masyarakat di lingkungan tersebut dan pihak penegak hukum dari kepolisian juga terlibat sebagai bentuk melancarkan kegiatan para penambang timah. Namun, hal itu tentunya memberi keuntungan bagi oknum-oknum tersebut karena setiap penambang memberikan *fee* kepada pihak keamanan sebagai bentuk timbal balik atas pengamanan mereka dalam menambang timah. Akan tetapi, dari kelancaran akses para aktor tersebut tentunya ada pihak yang terus dirugikan, di mana dalam hal ini adalah nelayan tradisional.

Penambangan timah dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakseimbangan dan kerentanan, karena masyarakat nelayan tradisional menjadi kelompok yang paling dirugikan (Sulaiman et al., 2015). Kerentanan itu mengakibatkan penghidupan nelayan menjadi terguncang. Hal ini dipengaruhi oleh ekosistem pada area penangkapan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang TI apung oleh penambang timah di Desa Penagan. Kelompok masyarakat yang menghuni pesisir pantai sangat bergantung pada sumber daya laut untuk mencari nafkah. Sumber penghasilan utama mereka berasal dari hasil tangkapan laut, dan mereka sangat terkait dengan kondisi alam serta ekosistem laut. Hasil tangkapan laut awalnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, setelah adanya Penambangan Timah (TI) laut yang beroperasi di perairan laut Desa Penagan dan sekitarnya, hasil tangkapan mereka mengalami penurunan yang sangat signifikan.



Gambar 1. Diagram Hasil Pendapatan Kotor Nelayan Desa Penagan

Sumber : Data Primer Peneliti, 2023

Hasil rekapitulasi dari rata-rata penghasilan nelayan menjelaskan bahwa mayoritas nelayan mengalami penurunan hasil tangkap di setiap bulannya di enam dusun dari sepuluh dusun yang ada di desa penagan. Adapun 4 dusun lainnya tidak mempunyai penambangan timah laut. Berdasarkan data primer yang peneliti lakukan melalui wawancara kepada nelayan dimasing-masing dusun menjelaskan bahwa rata-rata penghasilan kotor nelayan per-bulan pada dusun 1 sebelum adanya aktivitas penambangan timah di laut, yaitu Rp3.000.000. Akan tetapi,



setelah satu tahun terakhir semenjak adanya aktivitas penambangan, hasil tangkap ikan nelayan terus mengalami penurunan hingga Rp2.000.00 per/30 hari. Hal ini menunjukkan penurunan penghasilan yang signifikan.

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa semenjak adanya tambang timah laut selama satu tahun terakhir, penghasilan tangkap nelayan secara perlahan mengalami penurunan. Ini karena sedimen dari penambangan menutupi karang yang selama ini menjadi tempat tujuan tangkap nelayan di Desa Penagan. Air yang kotor juga membuat ikan di sekitar wilayah penambangan timah laut menjauh. Oleh karena itu, hal tersebut berdampak sangat merugikan bagi penghasilan nelayan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan dalam hal ini nelayan tradisional desa penagan yakni sebagai berikut:

“Semenjak adanya aktivitas penambangan timah ini kami sebagai nelayan sangat terasa dampak dari aktivitas penambangan, yang mana dahulu tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan, akan tetapi sekarang ini perlu menempuh jauh ke tengah laut untuk menjaring ikan, kami sebagai nelayan sebetulnya tidak setuju dengan adanya penambangan timah laut ini, namun kita sebagai nelayan kecil ini tidak akan di dengar oleh orang”.

(Wawancara dengan Bapak Herman selaku nelayan, 25 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Herman selaku nelayan tradisional menjelaskan bahwa adanya aktivitas penambangan timah di laut Desa Penagan ini sangat berdampak pada sektor ekonomi nelayan tradisional, sehingga jarak tempuh lokasi tangkap ikan semakin jauh dan modal yang dikeluarkan nelayan pun otomatis bertambah. Herman selaku nelayan tradisional menyayangkan adanya penambangan timah laut karena berdampak langsung bagi nelayan di wilayah Desa Penagan.

Akibat munculnya ponton-ponton timah, informan lain juga mengatakan hal yang sama terkait berkurangnya hasil tangkapan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Berikut wawancara dengan Pak H. Ramawi:

“Tambang timah di laut sudah dari awal saya tidak setuju karna menghancurkan laut kita, bagaimana nasib nelayan kita yang selama ini mencari makan sebagai nelayan, laut itu adalah ladang mereka, jadi kalau ada tambang di situ laut pasti rusak, nyar ikan susah kita zolim dengan nelayan kita, saya tidak setuju ada tambang timah di laut, kemudian sungai yang kami pelihara sekarang penuh dengan perahu penambang yang mengganggu kegiatan kami, menebar pukat pun sekarang sulit karena ada ponton-ponton di laut yang tempat kami biasanya mukat, otomatis lebih banyak memberikan dampak negatif daripada manfaatnya, bayangkan saja laut kita hancur”.

(Wawancara dengan Bapak H. Ramawi, 02 Oktober 2023)

Informan H. Ramawi mengatakan bahwa Aktivitas timah laut tidak memberikan manfaat kepada nelayan. Nasib nelayan menjadi dipertaruhkan akibat adanya penambangan timah. Sungai yang dulunya dijaga kebersihannya kini penuh berisi perahu penambang yang dianggap mengganggu aktivitas para nelayan dalam beroperasi atau melaut.



Gambar 2. Kondisi Sungai dan Perahu Penambang

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Keberadaan para penambang timah laut yang beroperasi di Desa Penagan juga telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Hasil wawancara narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa aktivitas penambangan telah merusak laut Desa Penagan. Kerusakan yang terjadi di antaranya ialah rusaknya terumbu karang, tercemarnya air laut, pendangkalan laut, dan musnahnya biota laut. Akan tetapi, dampak kerusakan terparah dari adanya aktivitas penambangan ialah kawasan sekitar wilayah penambangan itu sendiri.



Gambar 3. Kondisi Aktivitas Penambangan Timah Laut

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2023)

Aktivitas eksploitasi timah yang terfokus di perairan laut telah mengakibatkan transformasi pada lanskap daerah pesisir, penurunan kualitas air, kekeruhan laut, degradasi ekosistem, kepunahan biota laut, dan kontaminasi oleh logam berat (Adrian & Hartanto, 2022). Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti kepada nelayan terkait dampak aktivitas tambang timah sebagai berikut:

“Dampak dari tambang timah sangat jelas dilihat, terlebih lagi di wilayah sekitaran aktivitas penambangan, sedimen dari penambangan semakin dangkal, air laut tercemar minyak dan keruh, pohon bakau di wilayah tersebut mati, sangat disayangkan rasanya dari adanya aktivitas penambangan ini yang banyak menghasilkan dampak, namun mau gimana lagi karena desakan ekonomi, kami juga sudah pernah melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan”.

(Wawancara dengan Bapak Yunus, 03 Oktober 2023)

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional di Desa Penagan menolak adanya aktivitas penambangan timah laut di Desa Penagan. Para nelayan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Penagan sebagai bentuk protes dari adanya penambangan timah laut karena berdampak secara langsung kepada nelayan tradisional. Aksi tersebut muncul dari kelompok nelayan yang menolak keberadaan para penambang timah laut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yunus



selaku informan, yang berkata bahwa kelompok nelayan pernah melakukan aksi sebagai bentuk penolakan atas penambangan timah laut pada 29 September 2023.

Selain melakukan wawancara dengan nelayan tradisional yang kontra terhadap kehadiran penambangan timah laut di desa Penagan, peneliti juga menemukan pernyataan nelayan yang pro terhadap kehadiran tambang laut. Selain berdampak serius pada kelangsungan hidup manusia, pada prinsipnya, kegiatan penambangan timah, baik di darat maupun di laut, juga menghasilkan manfaat dari sisi finansial (Adrian et al., 2021). Hal ini kemudian diungkapkan oleh informan Fahrocin sebagai berikut:

“Saya pribadi ikut ambil kesempatan menambang, daripada orang luar wilayah penagan yang mengambil lebih baik kita masyarakat lokal yang ikut serta”

(Wawancara dengan Bapak Fahrocin selaku nelayan, 03 Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara Informan Fahrocin menyatakan bahwa akan lebih baik timah laut penagan diambil dan diberdayakan untuk masyarakat lokal bukan masyarakat pendatang. Beliau juga menyatakan bahwa adanya penambangan timah memberikan sisi positif kepada usaha-usaha kecil di daerah penagan seperti kontrakan dan warung makan serta para nelayan bisa mendapatkan pekerjaan ganda karena ikan juga tergantung pada musim.

Selain melakukan wawancara dengan nelayan tradisional, peneliti juga mewawancarai salah satu penambang timah laut Desa Penagan, berikut kutipan wawancara terhadap bapak Yandi sebagai perwakilan penambang sebagai berikut;

“Untuk penambangan timah di laut sekarang ini tidak masalah, orang juga mau cari makan, siapalagi yang mau beri makan keluarganya kalau tidak kerja jadi penambang, saya setuju-setuju saja adanya penambangan ini karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, untuk dampaknya tentu ada tapi apa yang paling kita prioritaskan, mungkin orang yang masih mempunyai kebun masih bisa makan, kalau tidak ada mau bagaimana lagi, pasti bekerja di penambangan timah juga”

(Wawancara dengan Bapak Yandi selaku Penambang Timah, 04 Oktober 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Yandi dapat disimpulkan bahwa beliau beranggapan aktivitas penambangan timah di laut Desa Penagan tidak perlu dipermasalahkan, karena hal ini bersangkutan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing. Oleh karena itu, dampak yang terjadi akibat TI adalah wajar terjadi dan tidak bisa dihindarkan karena kedua kelompok ini memiliki kepentingan yang sama yakni keluarga. Beliau juga menganggap bahwa TI adalah pekerjaan yang bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Sehingga peneliti pun menyimpulkan banyak warga Desa Penagan memilih menambang timah kepada keluarga sebagai pekerjaan yang efektif apabila tidak memiliki pekerjaan alternatif lain.

Pekerjaan alternatif lain sebagai pengganti pekerjaan utama juga diungkap oleh informan yang juga penambang namun memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Timah merupakan pusat ekonomi masyarakat di kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak jarang menambang menjadi pekerjaan pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informan yang bernama Jupri mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Penambang ini adalah masyarakat kampung kita juga, banyak juga saudara kerabat kita yang bekerja sebagai penambang. Saya sendiri



apabila tidak sedang berkebun ya saya harus menambang untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut saya tidak masalah ada tambang.”

(Wawancara dengan Bapak Jupri selaku Penambang Timah, 04 Oktober 2024)

Berdasarkan pada wawancara informan penambang di atas, peneliti melihat bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi sangat sensitif di pandangan masyarakat. Dampak yang terjadipun tentunya tidak bisa dihindarkan karena adanya kepentingan-kepentingan pekerjaan antara penambang dan nelayan tradisional. Kerentanan penghidupan terjadi apabila sumber-sumber penghidupan rumah tangga mengalami guncangan dan tekanan sehingga keberlanjutan penghidupannya menjadi terancam (Anugerah et al., 2021).

Nelayan tradisional juga merasakan dampak serius lainnya akibat aktivitas tambang timah di Laut Desa Penagan. Adanya kerusakan ekosistem laut telah menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya ikan, mengakibatkan nelayan menghadapi kesulitan dalam mencari hasil tangkapan. Selain itu, kerusakan alat tangkap nelayan turut menambah beban ekonomi mereka, karena memerlukan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian peralatan yang rusak. Semua dampak ini secara bersama-sama mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah tersebut (Adrian et al., 2021)

B. Analisis Konflik Kepentingan Nelayan dan Penambang Timah Berdasarkan Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf

Penambangan timah inkonvensional (TI) merupakan bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat tanpa perijinan atau ilegal. Akibat tidak adanya perijinan ini kemudian membuat masyarakat acuh terhadap kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi alam. Seringkali diabaikan atau berpura-pura seakan tidak ada pemahaman terhadap kondisi laut senantiasa memunculkan masalah di kalangan masyarakat terkait dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun peneliti menemukan faktor utama dan akar konflik antara masyarakat nelayan tradisional dengan penambang timah laut yakni keberadaan aktivitas tambang timah laut dan konflik masa lalu dengan pendatang terutama dari daerah selapan.

Pertama, keberadaan aktivitas tambang timah laut merupakan ancaman bagi masyarakat nelayan tradisional desa Penagan, sehingga muncul konflik di antara dua kelompok masyarakat ini. Menurut pandangan interaksionis, konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan justru didorong untuk dimunculkan dan dipertahankan pada tingkat minimum agar kelompok tetap kritis, kreatif dan semangat. Dengan demikian, konflik dapat menjadi positif di lingkungan masyarakat apabila dalam skala kecil, namun bila terjadi konflik skala besar yang membahayakan, maka harus diselesaikan karena tidak berfungsi dengan baik (Ekawarna, 2018).

Dalam pandangan C. Wright Mills, struktur sosial diciptakan melalui konflik antara orang dengan minat dan sumber daya yang berbeda. Individu dan sumber daya pada gilirannya dipengaruhi oleh struktur, distribusi kekuasaan, dan sumber daya manusia. Aktor yang terlibat yakni birokrat pemerintah dan masyarakat lokal (kelompok nelayan dan penambang timah laut). Pada bagian ini memperlihatkan adanya hubungan kekuasaan yang kompleks yang didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi.



Pemikiran Karl Marx tentang teori konflik menekankan bahwa keyakinan dan pola pikir memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan. Meskipun struktur kelas ekonomi berperan penting, namun tidak semua aspek kepentingan dapat dijelaskan sepenuhnya olehnya; sebaliknya, struktur tersebut dapat memengaruhi dinamika keseluruhan kepentingan. Sedangkan Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa Konflik pada dasarnya muncul karena penggunaan otoritas oleh manusia demi kepentingan pribadi semata. Kepentingan kelas atas yang memegang kendali atas kelas bawah cenderung dominan dalam usaha mempertahankan kekuasaan, dan hal ini terjadi karena struktur organisasi yang kacau. Otoritas tidak hanya bersumber dari individu, melainkan juga terkait dengan posisi dalam struktur hierarki (Nendissa, 2022).

Penambang timah merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan dalam kerentanan nelayan, sehingga masyarakat nelayan tradisional menjadi kelompok yang paling dirugikan. Sebagaimana Mills menyatakan dalam teorinya, elite kekuasaan akan menghasilkan peningkatan eskalasi konflik senjata pemusnah massal dan memungkinkan pemusnahan umat manusia (Knaap, 1994 dalam (Ekawarna, 2018)). Kerentanan yang mengakibatkan penghidupan nelayan menjadi terguncang yang dipengaruhi oleh ekosistem pada area penangkapan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas TI apung oleh penambang timah di desa Penagan. Dinamika konflik ini membuat berbagai elemen masyarakat Penagan mengalami persoalan masing-masing. Persoalan ini berupa sikap pihak antara nelayan tradisional, penambang timah laut dan pemerintah setempat yang belum memperoleh solusi tepat untuk penyelesaian akar dari konflik ini. Sikap pemerintah sebagai pihak struktural belum dapat bertindak tegas terhadap konflik tersebut sehingga sampai saat ini pemerintah Desa Penagan hanya memposisikan sebagai pihak netral yang meredam konflik secara sementara. Artinya pihak pemerintah lokal tidak pernah memposisikan peran mereka untuk menjembatani konflik di antara dua kelompok tersebut.

Dalam hal ini pemerintah lokal berpihak pada prinsip masyarakat berhak atas penghidupan sumber daya alam yang memang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing meskipun hal ini bertentangan pada kelestarian laut yang terjadi akibat penambangan laut sedangkan nelayan harus mencari ikan dilokasi yang sedikit lebih jauh, kemudian tidak bisa mengekspresikan aspirasi kelompok nelayan atas laut karena terpojok oleh isu “*semua rakyat berhak atas penghidupan sumber daya alam*” atau mengakses laut ini karena persoalan perut. Menurut Eva dan Ricardus, 2019 mengatakan bahwa sektor laut merupakan sumber daya alam yang bersifat *open acces* sehingga memunculkan pintu konflik penyebab terbukanya perbedaan kepentingan.

Menurut Marx, apa yang diperjuangkan oleh setiap individu dan kelompok sosial sebagai sebuah bentuk perlawanan didasarkan pada sifat sosial manusia yang selalu memperjuangkan kebutuhan dasar hidupnya. Marx meyakini bahwa kebutuhan dasar sebagai struktur pondasi mengacu pada kebutuhan-kebutuhan materialistis dengan menciptakan alat-alat dan sistem produksi agar kebutuhan materil tersebut dapat terpenuhi. Bentuk perlawanan masyarakat nelayan tradisional desa penagan sendiri adalah dengan melakukan aksi kolektif sebagai respon terhadap keberadaan TI apung yang mengancam kepentingan mereka. Mereka menyadari akan keterdindasan kelompok mereka. Nelayan tradisional desa Penagan mengalami kemerosotan pendapatan rill sampai hanya sedikit dan di dalam beberapa kasusnya lebih rendah pendapatan ketimbang rata-rata kelompok pekerja upah padahal mereka memegang peranan penting untuk



memenuhi menu ikan di Bangka Belitung. Mereka tetap melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meski cenderung tidak mencukupi untuk keperluan dadakan maupun hidup jangka panjang.

Kedua, konflik yang bersumber dari masalah sosial budaya. Masalah yang dipicu karena perkelahian antara kelompok pribumi dengan pendatang yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial. Konflik etnis yang terjadi sebenarnya sudah terjadi dalam kurun waktu yang sudah lama, terutama yang terjadi antara etnis Bangka dengan etnis Selapan. Permasalahan konflik muncul karena perizinan penambangan oleh pemerintahan saat itu. Munculnya keputusan dan peraturan daerah inilah yang membuat masyarakat berlomba-lomba melakukan aktivitas penambangan termasuk para pendatang etnis Selapan untuk peruntungan mencari nafkah juga. Konflik bermula yang terjadi di Toboali yang melahirkan dimensi kekerasan di dalamnya. Konflik tersebut lebih mengarah terjadinya disintegratif antara dua etnis. Menurut Barkah et al, 2016 dalam penelitiannya menyatakan bahwa tiga sumber konflik etnis toboali yakni 1) Perebutan sumber daya timah, permasalahan timbul karena perebutan kepentingan oleh etnis Bangka, etnis selapan, dan kelompok preman tambang. 2) Perebutan kelola laut, permasalahan muncul karena nelayan tradisional merasa dirugikan dan tidak dihargai akibat aktivitas TI apung oleh etnis selapan. 3) Segregasi sosial, persepsi etnis selapan terhadap etnis Bangka yang dianggap sombong, semena-mena sehingga persepsi ini menjadi stigma menggenalisir (Barkah et al, 2016).

Konflik yang terjadi di toboali kemudian merebak ke seluruh daerah di Bangka. Termasuk masyarakat Desa Penagan atau masyarakat lokal yang percaya bahwa etnis selapan kerap melakukan kekerasan dan terus merebut sumber daya masyarakat Bangka. Adanya prasangka yang berkembang turut andil dalam mengekskalasi konflik dalam skala yang lebih luas dan memunculkan trauma bagi masyarakat desa Penagan. Menurut salah satu nelayan melalui wawancaranya mengatakan bahwa sebagian besar TI apung di laut Penagan adalah etnis Selapan. Konflik yang terjadi tidak hanya karena kelompok etnis tetapi juga adanya motif kepentingan ekonomi di dalamnya. Peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor konflik yang menyebabkan dendam di antara masyarakat nelayan dan masyarakat TI apung diakibatkan karena lemahnya komitmen pemerintah dan pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah di waktu lalu. Rekonsiliasi konflik dari pemerintah belum dapat menyelesaikan permasalahan konflik dan dianggap mengabaikan realitas dari akarnya konflik di masyarakat.

Ketiga, hak-hak istimewa bagi pekerja nelayan tradisional secara resmi diakui dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang diundangkan pada tanggal 14 April 2016. Undang-undang ini menggambarkan bahwa nelayan, sesuai definisi, merujuk kepada warga negara Indonesia yang secara individu mencari nafkah dengan menangkap ikan, termasuk dalam kategori nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik. Penting untuk menegaskan bahwa dalam setiap aspek pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, perlindungan hak-hak nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional, harus selalu menjadi fokus utama. Secara mendasar, hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental bagi setiap individu sebagai klaim moral yang tidak dapat ditransfer dan melekat pada hak asasi setiap manusia (Levin, 1998: 3 dalam (Adrian et al., 2021)). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi seluruh warganya. Hal ini menjadi penting karena terkait dengan konsekuensi dari konstruksi



konsep kewarganegaraan yang memberikan identitas, hak istimewa, dan kewajiban kepada setiap individu terhadap negara itu sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ancaman terhadap hak-hak pekerjaan bagi nelayan tradisional di kawasan laut Desa Penagan. Dampak yang paling signifikan dari aktivitas penambangan adalah terbatasnya ruang gerak terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional. Namun demikian, seperti yang diungkapkan oleh Fukuda-Parr (2009: 202 dalam (Adrian et al., 2021)), akses terhadap pekerjaan dan kondisi kerja yang produktif merupakan fitur penting dari hak atas pekerjaan. Oleh karena itu, dampak terbatasnya kebebasan terhadap pekerjaan bagi nelayan tradisional dapat dianggap sebagai pengganggu terhadap produktivitas mereka.

Poin pertama dari dampak yang paling terasa terhadap hak atas pekerjaan nelayan adalah lahan tangkap yang digunakan ponton-ponton tambang timah sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Kemudian, ruang gerak pekerjaan bagi nelayan yang terganggu akibat aktivitas timah laut ini menghalangi jalur nelayan melaut, sehingga menyulitkan nelayan tradisional dan memperpanjang jarak yang harus mereka tempuh. Menurut hasil temuan peneliti, nelayan tradisional terpaksa menghindari lokasi tambang tersebut sehingga jarak yang ditempuh untuk melaut pun semakin jauh dan berbahaya bagi nelayan. Poin selanjutnya akibat dari aktivitas nelayan adalah kebutuhan operasional menjadi meningkat akibat jarak tempuh. Padahal, bahan bakar dan persediaan makanan juga menjadi faktor penting dalam aktivitas nelayan dalam bekerja dan menjalankan aktifitas. Ini disebabkan karena bahan bakar dan persediaan makanan merupakan kebutuhan operasional pokok bagi nelayan tradisional ketika mereka berlayar.

Poin selanjutnya dari hasil penelitian ini menunjukkan dampak kegiatan penambangan timah di perairan telah menyebabkan perpecahan pendapat di antara penduduk sekitar kawasan laut penagan, memicu perselisihan antara pendukung dan penentangnya. Konflik antar-warga yang berakar dari perbedaan pandangan ini, terutama memengaruhi masyarakat nelayan tradisional di kawasan tersebut, yang secara alami terbagi karena perbedaan kepentingan. Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa penambangan timah di laut bisa dilakukan karena ada dasar hukum yang mengaturnya, dan mereka menuntut hak kompensasi sebagai akibat dari aktivitas tersebut. Di sisi lain, kelompok yang menentang menolak semua kegiatan penambangan timah di laut serta menolak kewajiban kompensasi, karena mereka lebih memperhatikan kondisi laut di masa depan setelah aktivitas tersebut berlangsung.

Dalam analisis teori Dahrendorf, di dalam struktur sosial terdapat berbagai kepentingan yang beragam. Kekuatan yang memengaruhi pembentukan kelas sosial adalah kepentingan yang dimiliki oleh kelas tersebut. Dalam konteks ini, kepentingan kelas menjadi faktor utama yang menentukan pembentukan kelas sosial, yang berarti bahwa kepentingan kelompok dalam kelas tersebut lebih dominan dalam membentuk kelas daripada faktor lainnya. Dalam pembentukan kelas terhadap pengelolaan laut desa penagan, atas dasar kepentingan ini kemudian membentuk kelompok-kelompok kelas antara nelayan tradisional dan penambang timah laut. Pembentukan kelompok ini yang kemudian merujuk kepada kepentingan bersama. Dahrendorf mengatakan bahwa otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur utama dalam suatu analisis. Otoritas secara jelas menyatakan adanya superordinasi (berkuasa) dan subordinasi (yang dikuasai). Karena Masyarakat berada pada berbagai kelompok, seorang individu dapat menempati kelompok di suatu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit



yang lain. Mereka yang memiliki otoritas diharapkan akan dapat mengendalikan bawahan. Dalam artian mereka berkuasa karena harapan dari orang yang ada di lingkungan sekitar mereka, hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor "paksaan" oleh kelompok terhadap kelompok yang lain.

Dahrendorf mengklasifikasikan tiga tipe utama kelompok yaitu, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu adalah calon tipe kedua sebelum terbentuknya kelompok kepentingan, dan dari berbagai kelompok kepentingan muncullah kelompok konflik, kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. kelompok kepentingan dalam arti sosiologi memiliki struktur yang ketat. Dan kelompok ini adalah agen rill dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai tujuan, bentuk organisasi, atau program dan anggota perorangan. Fenomena kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan dalam distribusi otoritas "selalu menjadi faktor pemicu konflik sosial sistematis". Dahrendorf mengasumsikan bahwa konflik merupakan proses yang tak terhindarkan, timbul dari adanya kekuatan bertentangan dalam pengaturan sosial dan struktural, keterlibatan oknum korem sebagai pihak keamanan dan elit lokal sebagai dukungan tentunya memperoleh kekuasaan dalam mendominasi jalanya sektor timah di lingkungan sekitarnya, Sebagaimana resolusi konflik melalui meditasi yang dilakukan kedua kelompok masyarakat ini dengan memberikan kompensasi bahwa hal tersebut hanya akan menciptakan konflik yang berlanjut di antara kekuatan yang menentang. Hal ini sejalan dengan Penyelesaian konflik pada suatu titik waktu bisa menciptakan situasi struktural yang, dalam kondisi tertentu, tidak dapat dihindari, yang kemudian dapat mengarah pada konflik lebih lanjut antara kekuatan yang bertentangan (Nendissa, 2022).

KESIMPULAN

Simpulan

Setelah dilakukannya penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan timah di wilayah laut telah menimbulkan dampak negatif yang memicu terjadinya konflik antara penambang timah laut dan nelayan tradisional. Berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya dicirikan oleh konflik dan konsensus, suatu dualitas yang sering diabaikan oleh perspektif fungsionalis. Teori konflik dialektika Ralf Dahrendorf menyajikan pandangan masyarakat yang dinamis, menekankan ketegangan antara otoritas kepentingan dan konflik sebagai kekuatan pendorong perubahan sosial. Konflik antara penambang timah dengan nelayan terjadi karena para penambang yang awalnya mencari Timah di daratan mulai memasuki wilayah laut yang menyebabkan adanya kerusakan alam yang timbul akibat penambangan timah di wilayah laut Desa Penagan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas nelayan menjadi berkurang seperti ekosistem pada area penangkapan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penambang timah di Desa Penagan, Serta implementasi regulasi dan kebijakan seringkali tidak efektif dalam memperbaiki situasi konflik. Hal tersebut berdampak terhadap nelayan seperti jarak tempuh lokasi penangkapan dalam mencari ikan serta berdampak terhadap ekonomi yang menjadikan nelayan harus mengeluarkan biaya lebih banyak karena daerah tangkap menjadi lebih jauh.



Saran

Saran yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah Desa dan Daerah sebagai pemangku kepentingan, Hal yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi hak nelayan tradisional atas pekerjaan akibat tambang timah di laut Desa Penagan adalah dengan meningkatkan upaya untuk menjamin akses terhadap pekerjaan dengan melakukan evaluasi terhadap izin usaha penambangan timah di kawasan laut Desa Penagan. Selain itu, Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan keselamatan nelayan tradisional desa penagan dalam bekerja dengan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan wilayah laut yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik yang terjadi, Meminimalisasi risiko keselamatan dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan tradisional terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian, K., & Hartanto, R. V. P. (2022). Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Atas Pekerjaan Akibat Proyek Tambang Timah Di Kawasan Perairan Pulau Bangka. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2008, 211–225.
- Adrian, K., Winarno, & Hartanto, R. V. P. (2021). Analisis Dampak Aktivitas Proyek Tambang Timah di Perairan Laut Pulau Bangka terhadap Hak atas Pekerjaan Nelayan Traditional: Perspektif Inclusive Citizenship. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 76–85.
- Sudaryono, D. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung Alfabeta.
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Sulaiman, A., Zulkarnain, I., & Fakhurrozi, Y. (2015). Model Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Perspektif Resolusi Konflik (Studi Kasus Nelayan Teluk Limau Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Bumi Lestari*, 15(2).
- Yunianto, B. (2009). Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. 5(3): 97-113.